

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-2 dan ke-4 yang menyebutkan bahwa tujuan akhir pembangunan Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Menurut Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, mengatakan bahwa hingga Januari 2014 masih terdapat 2,3 juta penduduk Indonesia yang berada posisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)¹. Angka tersebut merupakan jumlah yang besar, mengingat setelah 68 tahun Indonesia merdeka nyatanya tujuan ini masih belum dapat terwujud.

Setiap negara akan selalu berupaya untuk mencapai kesejahteraan umum yang optimal untuk membawa masyarakatnya kepada standar hidup yang lebih baik. Baik itu melalui peningkatan fasilitas sosial, pendidikan serta perbaikan iklim usaha demi memacu pertumbuhan ekonomi. Setiap pemerintahan akan mengukur keberhasilan perekonomiannya dengan berbagai metode atau indikator yang paling representatif terhadap perubahan perekonomiannya.

Di negara-negara sedang berkembang, perhatian utama terfokus pada dilema kompleks antara pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Keduanya sama-sama

¹ *2,3 Juta Penduduk Indonesia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.*
<http://news.detik.com/read/2014/01/25/030202/2477916/10/23-juta-penduduk-indonesia-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial> (diakses pada: Selasa, 11/3/2014)

penting, namun hampir selalu sulit diwujudkan bersamaan. Pengutamaan yang satu akan menuntut dikorbankannya yang lain.

Tabel 1.1
Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2001-2011

Tahun	PDB	Pertumbuhan
2001	1.440.405,70	3,6
2002	1.505.216,40	4,5
2003	1.577.171,30	4,8
2004	1.656.516,80	5,0
2005	1.750.815,20	5,7
2006	1.847.126,70	5,5
2007	1.964.327,30	6,3
2008	2.082.456,10	6,0
2009	2.178.850,40	4,6
2010*	2.313.838,00	6,2
2011**	2.463.242,00	6,5

Sumber: BPS (data diolah)

Sumber: BPS (data diolah)

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Dari data yang disajikan dalam tabel 1.1 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun meski cenderung mengalami perkembangan yang positif. Pada tahun 2001 hingga tahun 2005 mengalami peningkatan yang cukup berarti yakni sebesar 2,1%. Namun kondisi ini seterusnya mengalami fluktuasi pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,2 % dari 5,7% pada tahun

2005 menjadi 5,5%. Penurunan juga terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 1,4% dari angka 6% pada tahun 2008 menjadi 4,6% pada tahun 2009. Penurunan ini terjadi disebabkan dampak krisis keuangan global yang terjadi di negara adidaya Amerika Serikat kepada seluruh negara di dunia termasuk Indonesia.

Pembangunan ekonomi mensyaratkan *Gross National Product* (GNP) yang tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi masalah bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasil-hasilnya. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan kini merupakan masalah pokok dalam pembangunan dan sasaran utama kebijakan pembangunan di banyak negara².

Dengan melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat pembangunan ekonomi negara tersebut. Pembangunan ekonomi merupakan masalah penting dalam perekonomian suatu negara yang menjadi agenda rutin setiap tahunnya. Selain demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pembangunan ekonomi diarahkan pada tujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran warganegaranya³. Bahkan yang lebih luas lagi mencakup penghapusan dan pengurangan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Tujuan tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang seimbang pada tiap-tiap daerah.

² Michael P. Todaro. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta: Erlangga. 2000), p 177-178

³ Eddy Soegiarto. *Pengantar Teori Ekonomi: Ekonomi Mikro Makro*. (Tangerang Selatan: Penerbit Mahkota Ilmu. 2011), p.110

Pembangunan ekonomi bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, namun dibutuhkan kerja sama yang sinergis dengan pemerintah daerah. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh daerah tentunya tidak terlepas dari permasalahan seperti masalah pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan serta ketidakmerataan pembangunan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dapat dijadikan kesimpulan akan pembangunan ekonomi yang merata dan tidak secara otomatis mampu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Jawa dan Bali ADHK dengan Migas Tahun 2007-2012 (Persen)

NO.	PROVINSI	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	DKI Jakarta	6.44	6.23	5.02	6.50	6.73	6.53
2.	Jawa Barat	6.48	6.21	4.19	6.20	6.48	6.21
3.	Jawa Tengah	5.59	5.61	5.14	5.84	6.03	6.34
4.	DI Yogyakarta	4.31	5.03	4.43	4.88	5.17	5.32
5.	Jawa Timur	6.11	5.94	5.01	6.68	7.22	7.27
6.	Banten	6.04	5.77	4.71	6.11	6.39	6.15
7.	Bali	5.92	5.97	5.33	5.83	6.49	6.65
JAWA+BALI		6.18	6.02	4.82	6.32	6.65	6.58
NASIONAL		6.35	6.01	4.63	6.22	6.49	6.23

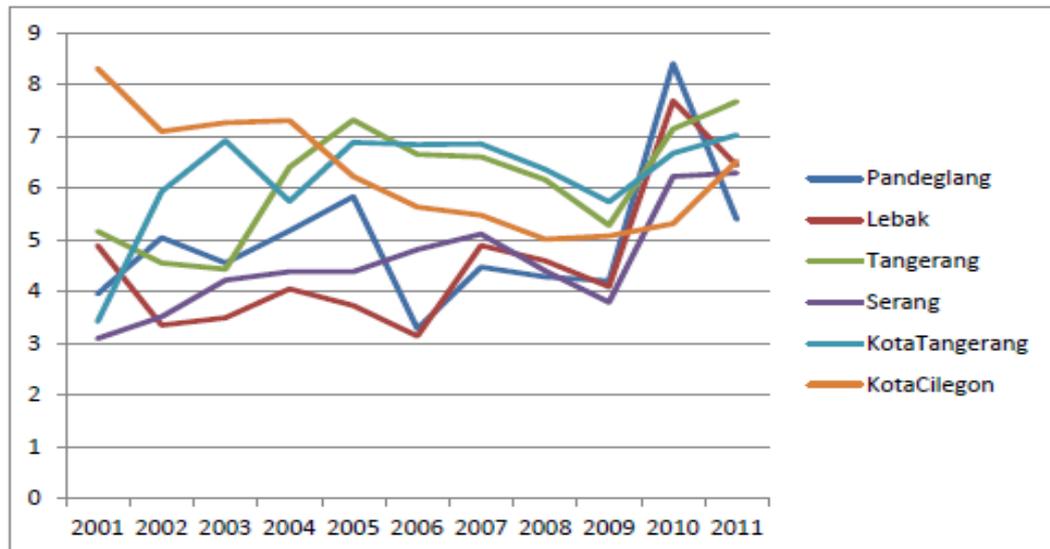
Sumber: BPS

Dari data yang tersaji pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Bali mengalami tren pertumbuhan yang positif. Dari tahun 2007 hingga tahun 2012, pertumbuhannya selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh skala nasional yakni sebesar 6,58% dari 6,23% . Dari 7 provinsi yang ada, terdapat 1 provinsi

yang tergolong baru yang mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan mampu bersaing dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Pulau Jawa bahkan Nasional, yakni Provinsi Banten. Pada tahun 2007 hingga tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten bermula dari 6,04% menjadi 6,15%.

Provinsi Banten merupakan bentukan provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Jawa Barat yang dilakukan pada tahun 2000. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000, Provinsi Banten telah resmi menjadi provinsi ke-28 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kini Provinsi Banten memiliki 8 daerah administrasi yang terdiri dari 4 kota dan 4 kabupaten. Keempat kota tersebut ialah Kota Tangerang, Cilegon serta yang paling baru ialah Serang dan Tangerang Selatan yang merupakan daerah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang pada tahun 2008 dan 2009. Sedangkan, keempat kabupaten tersebut terdiri dari kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang dan Lebak.

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Tahun 2001-2011

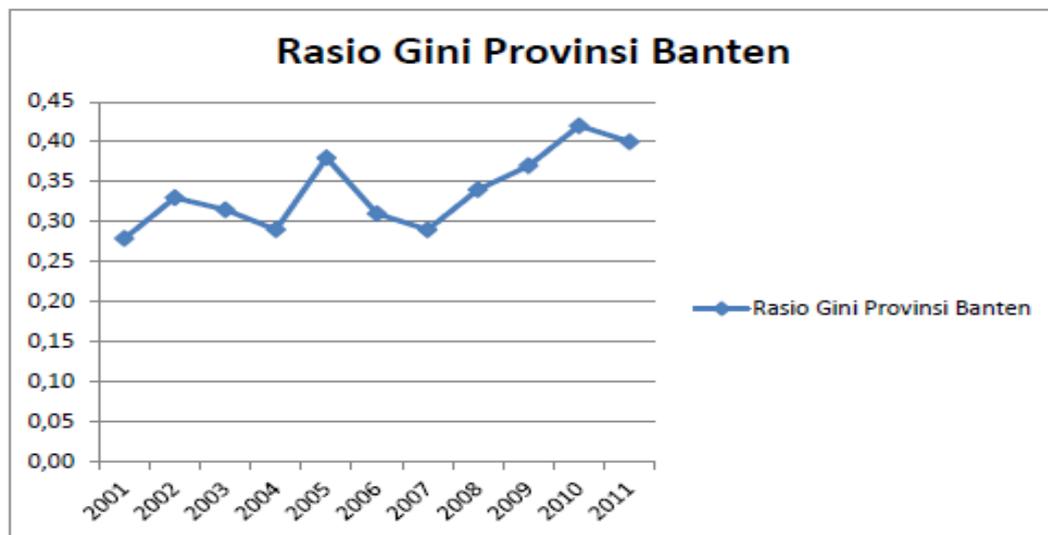


Sumber: BPS

Dari data yang terlihat dalam gambar 1.1 dimulai dari kurun waktu 2001 hingga tahun 2011 merupakan tahun-tahun setelah Provinsi Banten mengalami pemekaran. Gambar tersebut menunjukkan bahwa PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi kota dan kabupaten di Provinsi Banten mengalami peningkatan yang positif. Terdapat empat kota yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu Kota cilegon dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 10,30%, Kabupaten Tangerang 7,13% dan Kota Tangerang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,42%. Dilihat dari kontribusi terhadap PDRB, Kota Tangerang merupakan daerah yang memiliki kontribusi terbesar dibanding daerah-daerah lainnya. Kondisi ini disusul kemudian oleh Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon. Untuk daerah Pandeglang, Serang dan Lebak laju pertumbuhan ekonomi berjalan lamban pada kurun waktu tahun 2001 hingga tahun 2009.

Pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami peningkatan nyatanya tidak diimbangi dengan pemerataan keajahteraan juga distribusi pendapatan daerah-daerah di Provinsi Banten. Hal ini terlihat dari perkembangan rasio gini yang tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan.

Gambar 1.2
Rasio Gini Provinsi Banten Tahun 2001-2011



Sumber: Banten Dalam Angka

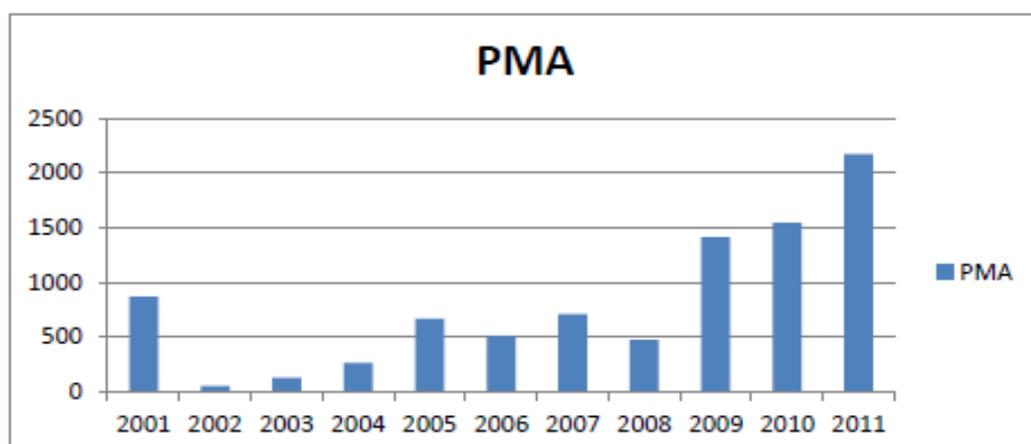
Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa ketimpangan antar daerah di Provinsi Banten mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada awal dilaksanakannya pemekaran, tingkat ketimpangan berada pada angka 0,28. Namun, setelah 10 tahun mengalami pemekaran yakni pada tahun 2011, tingkat ketimpangan tumbuh menjadi 0,40.

Daerah yang memiliki sumber-sumber input produksi seperti, tenaga kerja, modal, dan sumberdaya alam yang melimpah akan dapat menciptakan nilai tambah yang besar. Akan tetapi, tidak setiap daerah memiliki sumber-sumber input produksi, sarana dan prasarana yang sama. Hal ini akan berpengaruh pada

kemampuan tumbuh di daerah tersebut sehingga ada daerah mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya. Perbedaan inilah yang menyebabkan pembangunan antar satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Ketimpangan pembangunan tersebut dapat terjadi dalam ruang lingkup yang besar seperti antarnegara, ataupun dalam ruang lingkup yang lebih kecil yaitu antarprovinsi dalam suatu negara atau antarkabupaten/kota dalam suatu provinsi.

Meningkatnya ketimpangan ini memang merupakan kondisi alamiah yang seringkali terjadi terutama pada daerah-daerah yang baru berkembang. Faktor-faktor seperti perbedaan sumber daya alam, kondisi tenaga kerja, mobilitas barang dan jasa serta investasi pemerintah maupun swasta menjadi hal-hal yang terlibat didalamnya. Investasi merupakan faktor penting dalam upaya pembangunan suatu wilayah demi mengikis ketimpangan antar daerah. Dengan keunggulan strategis dari sisi lokasi, Provinsi Banten merupakan wilayah yang potensial yang menjadi sasaran investasi yang dilakukan oleh swasta.

Gambar 1.3
Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2001-2011 (ribu US\$)



Sumber: BPS

Menurut data yang tercantum dalam tabel 1.3 menunjukkan bahwa tingkat PMA di Provinsi Banten mengalami kondisi yang berfluktuasi. Meski sempat mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2001 ke tahun 2002 yakni semula berkisar 850 ribu US\$ menjadi 100 ribu US\$, namun tingkat PMA kembali mengalami peningkatan pada tahun 2005, 2007 dan 2009 berturut-turut ialah 400 ribu, 500 ribu dan 1,3 juta US\$. Secara umum, dalam kurun waktu 11 tahun tingkat PMA mengalami peningkatan yang cukup pesat yakni berkisar dari 800 ribu US\$ pada tahun 2001 menjadi 2,3 juta US\$ pada tahun 2011.

Gambar 1.4
Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Banten
Tahun 2008-2012

Wilayah/Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Pandeglang	190,933.05	205,832.03	208,496.04	318,845.53	421,576.94
Lebak	386,051.55	381,655.48	311,197.23	531,705.23	622,435.27
Tangerang	304,877.39	567,082.32	337,104.17	559,346.27	640,305.20
Serang	307,090.62	93,798.49	152,044.91	323,474.70	451,385.16
Kota Tangerang	600,425.73	657,343.72	797,035.91	1,003,940.56	1,276,768.70
Kota Cilegon	364,748.15	354,081.70	320,901.08	337,588.24	372,525.75
Kota Serang	209,198.50	322,394.17	385,295.81	400,132.56	424,078.39
Kota Tangerang Selatan	645,295.15	702,526.39	800,428.92	1,323,792	1,553,567.04

Sumber: BPS Provinsi Banten

Tidak hanya investasi atau PMA yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan antar daerah di Provinsi Banten, tingkat pengeluaran pemerintah juga memiliki peranan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan. Pada tabel di atas terlihat bahwa pengeluaran pemerintah dalam hal pembangunan mengalami besaran yang berfluktuasi. Kondisi ini terjadi pada hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten seperti Kabupaten Lebak, Kabupaten

Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Wilayah yang memiliki pertumbuhan yang positif ialah Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, serta Kota Tangerang Selatan. Hal ini menunjukkan besarnya upaya pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya ini diarahkan pada pengurangan ketimpangan yang terjadi antar daerah-daerah seperti Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Cilegon dengan daerah-daerah seperti Serang, Pandeglang dan Lebak. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami peningkatan di Provinsi Banten dapat diseimbangkan melalui pemerataan pembangunan dengan mengikis ketimpangan yang ada.

Berdasarkan uraian fakta di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis tingkat penanaman modal asing dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Banten.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah terjadi peningkatan ketimpangan pembangunan Kota/Kabupaten di Provinsi Banten pasca pemekaran?
2. Apakah laju pertumbuhan ekonomi Kota/Kabupaten di Provinsi Banten mengalami ketimpangan?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dibarengi oleh pemerataan pembangunan di Provinsi Banten?

4. Apakah peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan pengeluaran pembangunan oleh pemerintah tidak diseimbangi dengan pemerataan pembangunan di Provinsi Banten?
5. Apakah berdasar rasio gini telah terjadi ketimpangan pembangunan antara Kota/Kabupaten di Provinsi Banten?

C. Pembatasan Masalah

Melihat begitu luasnya ruang lingkup dari penelitian ini, menyebabkan peneliti mengalami kesulitan dalam penelitian ini. Kesulitan ini melingkupi dana, keterbatasan waktu dan tenaga. Oleh karena itu peneliti hanya membatasi ruang lingkup ini pada masalah: “Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Banten”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara penanaman modal asing terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Banten?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Banten?

3. Apakah terdapat pengaruh penanaman modal asing dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Banten?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan informasi dalam bidang ekonomi khususnya mengenai seberapa besar pengaruh penanaman modal asing dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Banten.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan mampu memberikan masukan dan solusi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan tentang pembangunan ekonomi, khususnya dalam hal penanaman modal asing dan pengeluaran pemerintah hingga pada akhirnya mampu mengikis ketimpangan yang ada.